

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja yang dicapai dalam suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi yang dihasilkan oleh organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah itu sendiri muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Khairani kinerja organisasi publik dapat didefinisikan sebagai hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien sesuai dengan kehendak pengguna jasa informasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengguna anggaran merupakan konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus sesuai dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Bahkan, departemen keuangan telah mengatur lebih rinci penerapan penganggaran kinerja dalam peraturan Menteri Keuangan No.

54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program komputer RKA-KL. Namun demikian hingga saat ini masih sulit untuk melihat tolak ukur memadai yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang komprehensif. Padahal tolak ukur ini sangat diperlukan untuk jadi pedoman, baik bagi pemerintah sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Dalam praktik, masih banyak dijumpai kelemahan sejak perencanaan kinerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran sampai dengan penuangannya dalam format-format dokumen anggaran (RKA-KL dan APBN). Meski pemerintah telah memiliki RKP, namun RKP ini hanya merupakan kompilasi berbagai usulan program kementerian/lembaga dengan indikator yang juga beragam yang menjadikan Bappenas mengalami kesulitan untuk merumuskan indikator kinerja nasional.

Pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan otonomi dan desentralisasi dengan diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah yang diserahkan bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Dengan diimplementasikannya peraturan tersebut berarti daerah memiliki kewenangan yang makin besar untuk mengurus rumah tangga sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya kewenangan yang lebih besar dalam pembuatan anggaran. Meningkatnya kewenangan tersebut tentu akan membawa berbagai implikasi daerah. Peningkatan wewenang penyusunan anggaran yang lebih besar bagi

daerah akan memungkinkan daerah untuk membuat berbagai program yang lebih aspiratif bagi masyarakat. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektivitas, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Berdasarkan sumber <https://mdn.biz.id>. Humbahas-Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara, Dosmar Banjarnahor angkat bicara soal tuding yang dialamatkan padanya terkait sudah 4 tahun berturut-turut PAPBD (2017,2018,2019,2020) gagal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Humbahas dengan agenda penandatanganan keputusan bersama eksekutif untuk pengesahan perda APBD. “Masalah kegagalan itu sudah dikoptasi bagian agenda kampanye politik oleh kelompok tertentu. Untuk pengesahan Ranperda PAPBD dalam kurun waktu 4 tahun, pemerintah dan DPRD gagal melaksanakan tugas untuk agenda rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama,” kata Dosmar Banjarnahor kepada sejumlah wartawan, di ruang rapat mini Kantor Bupati Humbahas, Doloksanggul, Jumat pekan lalu. Senada dikatakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Humbahas, Tonni Sihombing. Ia menjelaskan, kegagalan pengesahan PAPBD itu disebabkan tidak ditemukan kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif pada jadwal tahapan yang telah ditentukan. Toni Sihombing menyatakan “Kegagalan itu akibat berlangsungnya penjadwalan yang kita sampaikan. Kemudian, penjadwalan itu tidak diahiri untuk pengambilan keputusan bersama karena tidak korum,”.

Sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih menuntut seluruh pemerintah daerah bekerja secara profesional. Tuntutan yang semakin tinggi

diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, yang membuat ketidakpuasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan anggaran.

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan bawahan dan atasan dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Aparat perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang terlibat dalam proses penganggaran diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat SKPD pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian Wulandari, Mbon, Amril dan Natanael menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Akan tetapi hasil penelitian Arifin

menunjukkan hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan bahwa aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya

Disamping partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik juga dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Hasil penelitian Asrini menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, akan tetapi hasil penelian Amril menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melihat apakah kinerja yang belum sepenuhnya optimal tersebut bisa dipengaruhi oleh tingkat

partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik yang ada di kabupaten Humbang Hasundutan. Uraian tersebut menjadi alasan peneliti menemukan bukti empiris **“Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintahan Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang serta fakta-fakta diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Defenisi masalah menurut Sugiyono adalah **“Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”**.¹ Apakah partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Jadongan Sijabat:

“Tujuan Penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan, merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis”²

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu: bagi peneliti, bagi pemerintah daerah, dan bagi peneliti selanjutnya.

¹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif**, Bandung, 2016, hal.35

² Jadongan Sijabat, **Modul Metodologi Penelitian Akuntansi**: Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, hal.2

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memahami, dan mengembangkan wawasan berpikir tentang partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dipemerintahan daerah dan sebagai informasi untuk dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan kajian lebih lanjut tentang partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo: **“anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”**.³ Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumberdaya yang ada terbatas.

Menurut Halim dan Kusufi menjelaskan pengertian anggaran sebagai berikut:

“Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”⁴

Pengertian anggaran menurut Nafarin dalam Eni Kaharti adalah sebagai berikut:

“Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang dan jasa”⁵

³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, 2018, hal.61

⁴ Halim dan Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat, 2016, hal. 48

⁵ Eni Kaharti, *“Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran”*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, No.02, Vol.08, 2019

Dari defenisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2 Karakteristik Tujuan Anggaran

Menurut Kenis dalam Khairani ada lima dimensi Karakteristik Tujuan Anggaran (*budgetary Goal Characteristics*) yaitu:

1. **Partisipasi anggaran (Budgetary Participation)**
2. **Kejelasan Tujuan Anggaran (*Budgetary Goal Clarity*)**
3. **Umpan Balik Anggaran (*Budgetary Feedback*)**
4. **Evaluasi anggaran**
5. **Kesulitan Ujian Anggaran (*Budgetary Goal Difficulty*)⁶**

Penjelasan lima dimensi Karakteristik Tujuan Anggaran:

1. Partisipasi anggaran (*Budgetary Participation*)

Partisipasi anggaran mengacu pada sejauh mana manajer berpartisipasi dalam mempersiapkan anggaran dan mempengaruhi tujuan anggaran dalam tanggungjawab mereka.

2. Kejelasan Tujuan Anggaran (*Budgetary Goal Clarity*)

Kejelasan tujuan anggaran menggambarkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Kejelasan tujuan anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi.

⁶ Khairani, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik, Skripsi, Medan, hal. 11

3. Umpan Balik Anggaran (*Budgetary Feedback*)

Umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak punya dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan. Evaluasi Anggaran (*Budgetary Evaluation*)

4. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan

5. Kesulitan Ujian Anggaran (*Budgetary Goal Difficulty*)

Tujuan anggaran adalah range dari “sangat longgar dan mudah dicapai” sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai”. Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi.

2.1.3 Fungsi Anggaran

Halim dan Kusufi menyatakan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiskal Tool*)
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*)⁷

Penjelasan tentang fungsi utama anggaran sektor publik:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*) merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi,
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*) memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiskal Tool*) digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*) digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*). Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintah. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif,
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*) merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang,
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*) digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis,

⁷ Halim dan Kusufi, **Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta, Salemba Empat, 2016, hal. 48

efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, dan

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*) untuk menyampaikan suara masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik dan dibahas untuk mendapat masukan.

Mekari mengemukakan bahwa Penyusunan anggaran merupakan:

“Sebuah rencana yang disebut juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu dimasa mendatang”.⁸

Anggaran yang disusun secara *partisipative* merupakan cara efektif untuk memotivasi kinerja bawahan. Sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran.

⁸ Mekari, 4 Tahapan Penyusunan Anggaran Belanja Perusahaan, <https://www.jurnal.id>, diakses tgl 28 agustus 2022, 02.10 WIB

2.1.5 Partisipasi Anggaran

Menurut Dharmanegara Defenisi Partisipasi Anggaran adalah sebagai berikut:

“partisipasi anggaran adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya”.⁹

Karyawan harus dapat memberikan rekomendasi, merevisi angka-angka dalam anggaran bila diperlukan, dan menyetujui ataupun tidak menyetujui item-item yang utama. Munawar, dkk dalam Arifin menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.

Menurut Hansen dan Mowen dalam Aurora et all:

“Partisipasi anggaran (*budgeting participation*) adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreatifitas”¹⁰

Dengan begitu bisa dikatakan bahwa dengan keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengasah pengetahuan mereka tentang anggaran dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah. Siklus anggaran adalah masa

⁹ Dharmanegara, Ida Bagus Agung, *Penganggaran Perusahaan - Teori dan Aplikasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010

¹⁰ Aurora Febria, “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Mei 2021, 37- 44

atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.

Mardiasmo menyatakan partisipasi anggaran dalam akuntansi sektor publik memiliki empat tahap siklus anggaran yang terdiri atas:

- 1. Tahap persiapan anggaran (*Budget preparation*)**
- 2. Tahap ratifikasi anggaran**
- 3. Tahap pelaksanaan anggaran (*budget implementation*)**
- 4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran”¹¹**

Penjelasan empat tahap siklus anggaran:

1. Tahap persiapan anggaran (*Budget preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap ratifikasi anggaran

Tahapan ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Karena dalam tahapan ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap pelaksanaan anggaran (*budget implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislative, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahapan ini, hal terpenting yang harus

¹¹ Mardiasmo “**Akuntansi sektor Publik**, Andi, Yogyakarta, 2018 hal 81

diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap terakhir ialah tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Menurut Dharmanegara (2010) manfaat partisipasi yaitu bahwa partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka.

2.1.6 Akuntabilitas Publik

Mardiasmo menyatakan defenisi Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”¹²

¹² Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Yogyakarta, 2018, hal.27

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengarah pada kepada siapa organisasi dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ulum menyatakan pengertian dari Akuntabilitas adalah:

“akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.¹³

Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya”¹⁴

Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010:

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”¹⁵

Menurut Mahmudi Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut:

¹³ Ulum, Ihyaul. **Akuntansi Sektor Publik**. UMM PRESS. Malang 2008 hal 45

¹⁴ Penny Kusumastuti, **Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi keDepan**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014 hal. 2

¹⁵ Anggota IKAPI, **Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010**, Edisi Terbaru, Cetakan Pertama: Fokus Media, Bandung, 2012, hal. 21

“Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.”¹⁶

Mahmudi juga menyatakan akuntabilitas terdiri atas dua macam yaitu:

- 1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)**
- 2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)¹⁷**

Penjelasan tentang 2 macam akuntabilitas:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Mahsun menyatakan terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk menekankan pada pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi.

Ellwood dalam Mahsun menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

¹⁶ Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, Hal. 9

¹⁷ **Ibid**, hal. 49

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and Legality*)**
2. **Akuntabilitas proses**
3. **Akuntabilitas Program**
4. **Akuntabilitas Kebijakan¹⁸**

Penjelasan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh

organisasi sektor publik:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan pejabat (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dan hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

¹⁸ Mahsun, **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, BPFE, Yogyakarta, 2014, Hal. 86

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.7 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Mahsun menyatakan bahwa Defenisi Kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi”.¹⁹

Tanpa ada tujuan dan target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Robertson dalam Mahsun menjelaskan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi pengguna sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Ulum menjelaskan bahwa **“pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.**²⁰ Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah,

¹⁹ Mahsun, Mohammad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE- Yogyakarta, Yogyakarta 2015. Hal. 141

²⁰ **Opcit.** Hal 182

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal berikut:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang disarankan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab,

- b. Spesifikasi teknis dan standardisasi.

Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dapat dijadikan sebagai standar penilaian,

- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja,

- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial,

sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman, dan

e. Mekanisme sumber daya manusia

Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pemerintah daerah sebagai berikut, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat:

1. Unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;
2. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;
3. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta
4. Unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

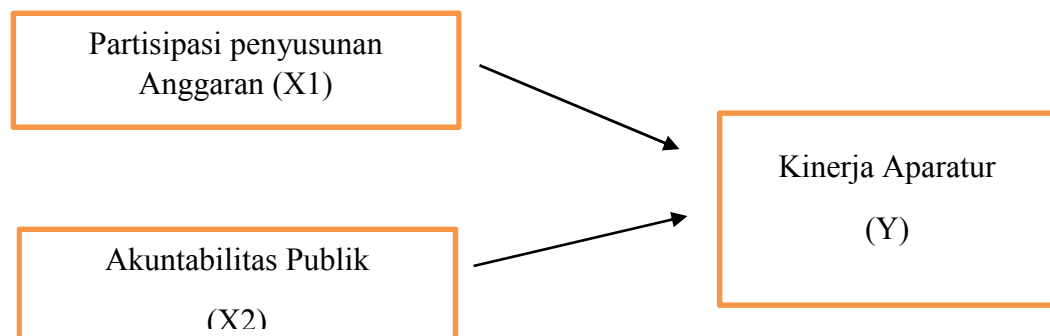
No	Nama dan judul peneliti	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Fladimir Edwin Mbon (2018) Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas public terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
2.	Khairani Ulfa Dalimunthe (2018) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
3.	Natanael (2016) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas public Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
4.	Ning Umbar Susilowati (2016) pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran dan akuntabilitas publik	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran dan akuntabilitas publik	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran dan akuntabilitas publik

	akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
5.	Fatmawati Khoirul (2019) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran dan akuntabilitas publik Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
6.	Suhardi M dan Sumiati (2014) pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Independen; partisipasi penyusunan anggaran Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
7.	Fadhil Ardy (2018) pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan akuntabilitas publik Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
8.	Jusnaini (2019) pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, terhadap kinerja aparat pemerintah daerah	Independen; partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan akuntabilitas publik Dependen; kinerja aparat pemerintah daerah	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah PengaruhPartisipasi Penyusunan Anggaran (X1), dan Akuntabilitas Publik (X2). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten Humbang Hasundutan. Kerangka konseptual dibawah ini menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial. Untuk lebih jelasnya pengaruh antara hubungan variabel Independen dan Variabel Dependen dapat dilihat dari gambar kerangka dibawah ini. Adapun gambar kerangkanya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang diungkapkan secara deklaratif. Hipotesis penelitian menurut Sudjana adalah **“asumsi atau dugaan sementara tentang hal yang dibuat, guna menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk pengecekan”**²¹. Pernyataaan atau dugaan diformulasikan dalam bentuk variabel agar dapat diuji secara empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut: partisipasi penyusunan

²¹ Vania Karunia Mulia Putri. **Pengertian Hipotesis Menurut Para Ahli, fungsi, ciri, dan Manfaatnya**, diakses dari <https://www.kompas.com>, pada tgl 29 Agustus 2022, jam 14.30

anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah baik secara parsial.

a. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan (Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Jusnaini pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, terhadap kinerja aparat pemerintah daerah menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Khairani Ulfa Dalimunthe Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan

sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah ada, maka penelitian ini kembali dilakukakan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah

b. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Mardiasmo menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut

“kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”²²

Fadhil Ardy Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Fladimir Edwin Mbon pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah

²² Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta. 2018

daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Diduga akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Sugiyono menyatakan bahwa variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparat pemerintah Daerah (Y) dan variabel independen adalah Akuntabilitas publik (X1), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2),

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif. Sugiyono menyatakan **“penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih²³”**. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dimana data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

²³ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, Penerbit: Alfabeta. Bandung. 2010, hal.55

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja (SKPD) Humbang Hasundutan dengan memberikan kuisioner kepada responden yang menjadi sampel pada wilayah tersebut. Dimana jumlah SKPD di Humbang Hasundutan sebanyak 24 SKPD.

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Jugyanto menjelaskan defenisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek (properti) kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat dikur dan dioperasioanalkan di dalam riset. Hasil dari pengoperasional konsep ini adalah defenisi konsep dari masing-masing variabel dan konsep yang digunakan di riset. Berdasarkan desain penelitian assosiatif kausal yang merupakan desain penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Variabel Dependen Y

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) merupakan hasil dari proses aktivitas pemerintahan sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan karyawan mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Instrumen yang digunakan dalam mengukur kinerja aparat pemerintah daerah yaitu instrumen Mahoney dalam penelitian Anggraeni.

3.4.2 Variabel Independen (X)

1. Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₁)

Brownell dalam Wulandari mendefenisikan partisipasi anggaran sebagai suatu proses partisipasi individu akan dievaluasi dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan prestasi

mereka pada sasaran. Berikut ini dimensi dalam partisipasi anggaran keterlibatan aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran, merevisi anggaran, usulan tentang anggaran, banyaknya input, memandang kontribusi/ pendapat dalam penyusunan anggaran. Instrumen yang digunakan dalam mengukur partisipasi penyusunan anggaran yaitu instrumen Milani dalam penelitian Anggraeni.

2. Variabel Akuntabilitas Publik (X \square)

Akuntabilitas Publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan. Untuk variabel akuntabilitas publik diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ellwood dalam Mardiasmo. Dimana terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala pengukuran
Kinerja aparat (Y)	Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program 2. Ketetapan dan kesesuaian hasil 3. Tingkat pencapaian 	Likert

	periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya	<p>program</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dampak hasil kegiatan terhadap kegiatan masyarakat 5. Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran 6. Pencapaian efisiensi operasional 7. Perilaku pegawai 	
Partisipasi Anggaran (X1)	Partisipasi anggaran sebagai suatu proses partisipasi individu akan dievaluasi dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan prestasi mereka pada sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran 2. Alasan atasan dalam merevisi anggaran yang diusulkan 3. Pemberian saran dan pendapat 4. Pengaruh manajer dalam finalisasi anggaran 5. Pentingnya kontribusi yang diberikan Frekuensi penyampaian pendapat 	Likert
Akuntabilitas publik (X2)	Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran 2. Hukum 3. Program 4. Progress 5. Kebijakan 	Likert

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Sugiyono mengemukakan

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.²⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 3.2
Daftar SKPD Yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Nama Dinas atau Badan
1.	Dinas komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
2.	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3.	Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD)
4.	Dinas perumahan dan kawasan permukiman (PKP)
5.	Dinas pencatatan sipil dan kependudukan
6.	Dinas sosial
7.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP)
8.	Dinas Peternakan dan perikanan
9.	Dinas pendidikan
10	Sekretariat DPRD
11.	Dinas Perhubungan
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
13.	Inspektorat

²⁴ Sugiyono, **Op.Cit.**, hal. 80

14.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
16.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul
17.	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)
18.	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.	Dinas Lingkungan Hidup
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A)
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
24.	Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga

Sumber: humbanghasundutankab.go.id

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai presentasi dari populasi dari secara keseluruhan. Dengan demikian sampel adalah bagian dari jumlah dan **karakteristik** yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*. Menurut Sugiyono **“*Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif”**²⁵

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD di 24 kantor dinas yang mewakili Kabupaten Humbang Hasundutan. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang menduduki jabatan mulai dari Kepala bagian, Kepala Bidang, dan Kepala

²⁵ Sugiyono. *Loc.Cit*

Seksi/setingkat Kepala Seksi yang terlibat dalam partisipasi penyusunan anggaran yang ada di SKPD.

Adapun kriteria dari responden yang ditetapkan sebagai sampel adalah:

1. Pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.
2. Jenjang pendidikan pegawai minimal D3
3. Pegawai telah bekerja minimal 2 tahun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Alasan pemilihan sampel tersebut adalah pegawai yang menjabat posisi tersebut adalah pegawai yang menjabat posisi tersebut ikut serta dalam penyusunan anggaran sehingga dapat memberikan informasi kepada peneliti, tentang sejauh mana keikutsertaan dalam partisipasi penyusunan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono **“Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”**²⁶ Sumber data primer berupa data langsung yang dikumpulkan menggunakan alat yaitu daftar pertanyaan (kuisisioner). Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner, data yang didapatkan bersumber dari SKPD Humbang Hasundutan yang dipilih sebagai studi kasus penelitian. Instrumen dalam kuisisioner merupakan replikasi dari penelitian terdahulu.

3.7 Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian

²⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi: 15, Alfabeta, Bandung, 2010

Dalam upaya memperoleh informasi data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawaban sebagai dasar landasan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini, maka penulis memperoleh beberapa cara sebagai berikut.

3.7.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Upaya ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari dan mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam proposal ini. Data tersebut dapat diperoleh melalui literatur-literatur, buku-buku referensi dan lain-lain yang ada hubungannya dengan proposal ini

3.7.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pimpinan dan staff atau pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bidang-bidang permasalahan yang akan dibahas oleh penulis untuk memperoleh informasi yang bermutu dan dapat dipercaya. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner.

Adapun tolak ukur yang digunakan dalam distribusi untuk pengisian kuisisioner sudah tersedia jawaban alternatif dari setiap item sehingga responden dapat memilih satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dan keadaannya sendiri. Pengukuran yang digunakan untuk setiap item pertanyaan terdapat lima alternatif. Lima alternatif jawaban yang akan digunakan diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5, adapun untuk perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Jawaban sangat setuju : skor 5
2. Jawaban setuju : skor 4
3. Jawaban Kurang Setuju : skor 3
4. Jawaban tidak setuju : skor 2
5. Jawaban sangat tidak setuju : skor 1

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Humbang Hasundutan yang dianalisis menggunakan SPSS 22.0.

3.8.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuisisioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuisisioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang, seseorang diberi pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
- b. *One Short* atau pengukuran sekali saja: jawaban dari responden diperoleh hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS merupakan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. **Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak mencong ke kiri atau ke kanan)**²⁷ Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual yang telah di- studentized. Adapun dasar analisisnya sebagai berikut.

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Uji Multikolinearitas

²⁷ Enterprise, Jubilee. 2018. **SPSS Komplet Untuk Mahasiswa**. Jakarta. Kompas. Gramedia

Husein Umar menyatakan: **“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen)”**²⁸. nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$ dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

3.8.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan komitmen organisasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Ghozali mengatakan bahwa **“Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen”**²⁹. Persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Aparat

α = Konstanta

X_1 = Partisipasi Anggaran

X_2 = Akuntabilitas Publik

β_1 = Koefisien dari Partisipasi Anggaran

β_2 = Koefisien dari Akuntabilitas Publik

ϵ = Faktor Kesalahan

3.8.4 Uji hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

²⁸ Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**. Edisi kedua: Rajawali pers. Jakarta, 2008, hal 177

²⁹ Meiryani, **Memahami Analisis Regresi linear Berganda**, <https://accounting.binus.ac.id>, diakses tgl 29 agustus 2022, jam 02.42

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R^2 semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Apabila nilai R^2 mendekati satu, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian parameter individual dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian sebagai berikut; Bila t hitung $<$ t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung $>$ t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.